



## ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI RSBI SMP NEGERI)

Mukhid <sup>✉</sup>

Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Januari 2012  
Disetujui Februari 2012  
Dipublikasikan Agustus 2012

*Keywords:*  
RSBI Funding

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui *unit cost* di SMP Negeri 2 Rembang, 2) kesanggupan orang tua murid 3) Hambatan yang dihadapi sekolah dalam menggalang dana dari orang tua dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Besaran *unit cost* di SMP Negeri 2 Rembang tahun 2010/2011 Rp3.222.128, 2) Orang tua murid di RSBI SMP Negeri 2 Rembang memiliki kesanggupan yang fluktuatif, 3) Hambatan dalam menggalang dana dari orang tua murid adalah komunikasi, rendahnya penghasilan, pendidikan rendah. Hambatan dari masyarakat kurangnya pertanggungjawaban secara akademik dan sosial, perilaku yang kurang wajar terhadap siswa, persaingan antar kelompok dan krisis kepercayaan terhadap sekolah. SMP Negeri 2 Rembang diharapkan meningkatkan prestasi dan memperbaiki Proses belajar mengajar.

### Abstract

*The objectives of the research are 1) to find out the unit cost in SMP Negeri 2 Rembang, 2) The willingness of the students; parents 3) School problem in gaining the fund from te parents and society. The research uses qualitative approach. The result shows 1) The unit cost in SMP Negeri 2 Rembang in 2010/2011 is Rp3.222.128, 2) The parents have fluctuative willingness, 3) The problem in gaining the fund are communication, low revenue, low education, no academic and social responsibility, unsupported attitude toward the students, group competition, and no trust to the school. SMP Negeri 2 Rembang is expected to improve the achievement and gaining better teaching and learning process.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Kampus Unnes Bendan Ngisor Semarang 50233  
E-mail: [pps@unnes.ac.id](mailto:pps@unnes.ac.id)

## Pendahuluan

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Supriadi 2010: 3). Semua sepakat bahwa pendidikan adalah penting dan primer bagi terciptanya kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara. Karena pentingnya sektor pendidikan tersebut, pemerintah sejak 2009 memiliki *political will* yang tegas dan berani untuk membawa bangsa ini menjadi semakin berkualitas, bermartabat, dan memiliki daya saing tinggi lewat prioritas sektor pendidikan. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan merupakan satu-satunya penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa biaya yang memadai akan sulit pendidikan bermutu dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Pendidikan bermutu hanya akan menjadi utopia. Pihak yang tidak diuntungkan dengan tidak dipenuhinya amanat konstitusi ini adalah rakyat kecil dan marginal.

Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Hal ini untuk memperjelas tentang pendidikan gratis dan bermutu yang dicanangkan oleh pemerintah, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

Biaya merupakan salah satu faktor pen-

ting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya yang memadai. Ditinjau dari sisi ekonomi tidak ada kegiatan (termasuk kegiatan pendidikan) yang tidak membutuhkan biaya, terlebih jika sudah dikaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Semakin tinggi tuntutan kualitas semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. Biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pendidikan.

Pemerintah berkomitmen menyelenggarakan pendidikan bermutu, di antaranya mengupayakan terseleggaranya pendidikan bertaraf internasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat (3), yakni "*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional*". Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa Indonesia di forum internasional.

Konsep Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)* dan atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Sekolah Bertaraf Internasional harus bisa memberi jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional 2007: 5).

SMP Negeri 2 Rembang dipilih Pemerintah Kabupaten Rembang untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang didahului dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Secara formal SMP Negeri 2 Rembang telah memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan standar tersebut dalam penelitian ini peneliti hanya akan menganalisis salah satu dari delapan standar, yaitu standar pembiayaan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Keterlibatan dan dukungan komite sekolah cukup baik, kepercayaan masyarakat atau orang tua siswa juga cukup baik, hal ini dapat di-

lihat dari minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, jumlah pendaftar tiga tahun terakhir menunjukkan trend meningkat, pada tahun pelajaran 2008/2009 daya tampung 179 siswa jumlah pendaftar 301 anak, tahun 2009/2010 daya tampung 182 siswa jumlah pendaftar 302 anak, dan tahun 2010/2011 daya tampung 208 siswa jumlah pendaftar 365 anak. Orang tua siswa juga memberikan dukungan dana pada program-program yang ada di sekolah, sumbangan-sumbangan tersebut berjenjang, siswa kelas 7, 8, dan 9 masing-masing Rp500.000, Rp400.000, dan Rp300.000, dan SPP Rp75.000/siswa/bulan, untuk siswa miskin gratis. Jumlah sumbangan dan iuran setiap siswa tergolong kecil bila dibandingkan dengan RSBI di kabupaten lain karena Rembang adalah daerah miskin.

Hal yang mendorong peneliti untuk menganalisis pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang adalah karena: (1) belum banyak penelitian mengenai pembiayaan pendidikan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, (2) untuk mengetahui besaran *unit cost* RSBI, (3) seberapa besar kesanggupan orang tua murid membiayai anaknya mengikuti pendidikan di RSBI, (4) hambatan-hambatan apa yang dihadapi sekolah dalam menggalang dana dari orang tua murid dan masyarakat, (5) bagaimana proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Rembang, dan (6) bagaimana mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang setelah menjadi sekolah berstatus RSBI.

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan konsep mengenai pembiayaan pendidikan di SMP Rintisan Bertaraf Internasional sehingga dapat digunakan untuk menambah informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Rembang.

Efisiensi dan efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang, akan peneliti ukur tingkat keberhasilan penggunaan dana dalam membiayai semua program yang menjadi prioritas pengembangan sekolah. Indikator keberhasilan diukur dari perolehan nilai UN tiga tahun terakhir, prestasi sekolah dalam menjuarai olimpiade di tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, dan juga keberhasilan menjadi juara di bidang olah raga dan seni di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

## Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pembiayaan

di SMP Negeri 2 Rembang. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2010.

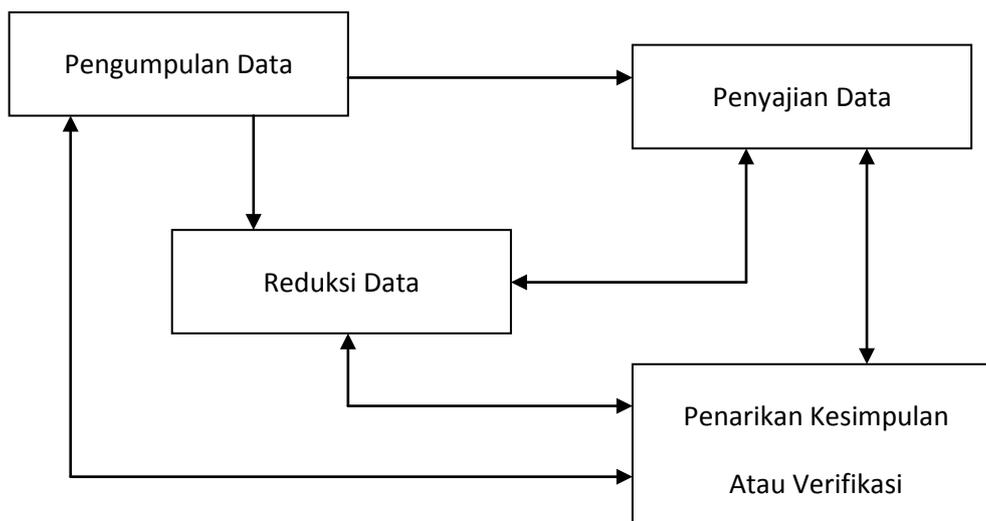
Objek penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Rembang yang berlokasi di Kabupaten Rembang. Data yang dikumpulkan ialah yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu pembiayaan pendidikan. Jenis data penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (1) data primer, dan (2) data sekunder. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek. Karakteristik data primer berbentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Sesuai dengan jenis data tersebut di atas, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi penulis lakukan untuk melihat langsung berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di sekolah yang diteliti. Wawancara penulis gunakan dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat perolehan data dari responden. Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai sejumlah *key informan* yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, guru, pegawai dan siswa. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian.

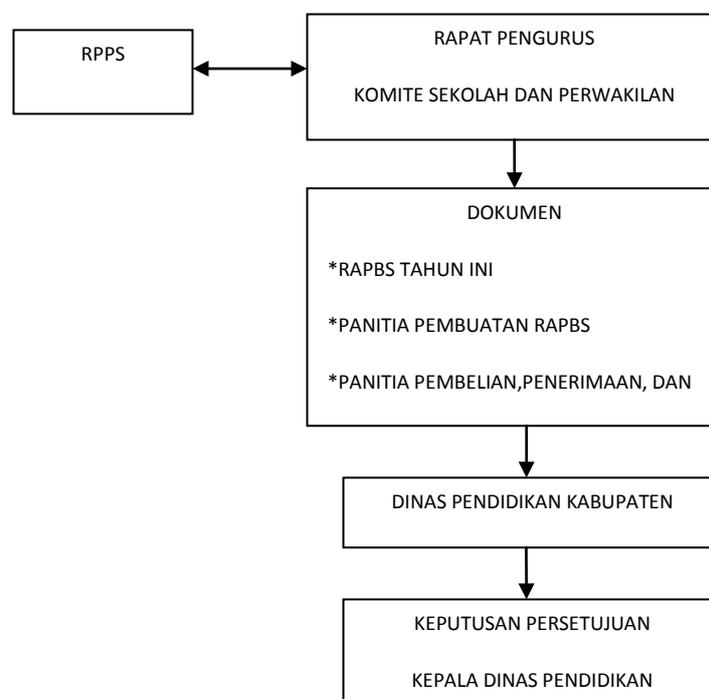
Ada empat kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, yaitu : 1) derajat kepercayaan, 2) keteralihan, 3) kebergantungan, dan 4) kepastian. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan anggota. Dari berbagai teknik tersebut, penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi (Moleong 2009: 327).

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber yaitu observasi/pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Adapun prosedur analisis data yang penulis tempuh dalam penelitian ini meliputi (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.



**Gambar 1.** Langkah-langkah Analisis Data



**Gambar 2.** Proses Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 2 Rembang  
Sumber: DD KS; D.Dok.

### Hasil dan Pembahasan

Proses penyusunan anggaran biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang merujuk kepada dokumen Rencana Program Pengembangan SMP Negeri 2 Rembang Tahun 2005-2012. Dari hasil telaah dokumen dan wawancara yang penulis lakukan di SMP Negeri 2 Rembang, proses penganggaran pendidikan dapat diringkaskan da-

lam Gambar 2.

Aspek pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang terkait dengan perencanaan pengembangan yang memuat komponen-komponen : (1) Ketercapaian tujuan institusional SMP; (2) Organisasi dan manajemen sekolah; (3) Pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Kegiatan belajar mengajar; (5) Lingkungan Sekolah; (6) Pengembangan sarana prasarana pendidikan;

dan (7) Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat.

Sumber biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang berasal dari anggaran pemerintah, yaitu dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan dari orang tua murid, berupa bantuan SPI dan SPP.

SMP Negeri 2 Rembang dihadapkan pada terbatasnya dana yang tersedia, tetapi kebutuhan cenderung meningkat dan tidak terbatas (Dok. KS). Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan-persoalan keuangan di atas SMP Negeri 2 Rembang berupaya mengelola keuangan secara lebih baik dan efisien. Pengalokasian biaya lebih ditekankan pada skala prioritas. Yang paling mendesak untuk segera dipenuhi menjadi prioritas dalam penganggaran, begitu pula hal yang dianggap penting dan membutuhkan anggaran besar maka akan dianggarkan lebih besar. Naik turunnya anggaran disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan.

Mengenai evaluasi pendayagunaan biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Rembang, secara administratif diarahkan kepada mekanisme pengolahan dana secara terpadu. Keterpaduan tersebut terlihat dari keterkaitan unit-unit kerja lembaga pendidikan di dalam proses-proses administratif secara teratur dan dalam siklus tertentu dengan maksud memperjelas tentang siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, bagaimana dan untuk apa hal itu dilakukan. Adapun kegiatan pokok evaluasi terdiri atas pemeriksaan dan pelaporan.

Jumlah besaran *unit cost* persiswa pertahun di SMP Negeri 2 Rembang dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran biaya operasional dan biaya peningkatan mutu selama setahun dibagi dengan jumlah siswa. Besaran *unit cost* per siswa di SMP Negeri 2 Rembang pada tahun 2008/2009 sebesar Rp2.644.290,00. Hal ini berasal dari pengeluaran belanja pegawai sebesar Rp161.820.000,00 ini merupakan pengeluaran terbesar dari pengeluaran biaya operasional, diikuti pengeluaran biaya kegiatan kesiswaan dan biaya KBM dan Pelatihan masing-masing Rp160.890.300,00 dan Rp105.857.750,00. Bila diakumulasikan jumlah biaya KBM dan Pelatihan dan biaya Kegiatan Kesiswaan masih lebih besar dibandingkan belanja pegawai, yaitu mencapai angka Rp266.748.050,00. Belanja barang, langganan daya dan jasa jumlahnya juga lebih kecil, terlebih bila dibandingkan pengeluaran biaya Peningkatan Mutu yang mencapai Rp956.166.693,00 jauh lebih besar dari jumlah biaya Operasional. Tahun 2009/2010 meningkat menjadi Rp3.840.184,00, ada peningkatan *unit cost* sebesar Rp1.195.894,00. Terdapat kenaikan dan penurunan anggaran

pada pos-pos tertentu pada Biaya Operasional. Kenaikan yang paling mencolok terdapat pada Belanja Barang dan penurunan yang mencolok terjadi pada anggaran Kegiatan Kesiswaan, ini tidak diartikan kegiatan kesiswaan dinomorduakan karena untuk kegiatan tersebut ditopang dari anggaran Peningkatan Mutu yang mengalami peningkatan Rp413.471.577,00 menjadi Rp1369.638.270,00.

Tahun 2010/2011 mengalami penurunan sebesar Rp618.056,00 sehingga menjadi Rp3.222.128,00. Penurunan terjadi di semua mata anggaran kecuali pada Program Komite Sekolah.

Perbedaan latar belakang sosial ekonomi orang tua/wali siswa mempengaruhi tingkat kesanggupan dalam membiayai aktivitas pendidikan anak. Dari beberapa pendapat orang tua murid dapat diketahui bahwa pada dasarnya mereka memiliki kesanggupan dalam membiayai anaknya. Orang tua/wali murid menyadari tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, semakin baik kualitas pendidikan suatu sekolah akan semakin baik pula kualitas lulusan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam menggalang dana, yakni datang dari orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Hambatan yang muncul dari orang tua yakni komunikasi yang kurang baik antara anak dan orang tua, perbedaan persepsi orang tua murid tentang sekolah gratis, dan perbedaan jumlah siswa di RSBI. Hambatan yang muncul dari masyarakat antara lain rendahnya tingkat penghasilan masyarakat, merasa tak berwenang dan tidak mampu, serta pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang kurang. Hambatan yang muncul dari pemerintah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah datangnya selalu terlambat sementara kegiatan di sekolah harus berjalan terus, dari unsur pemeriksa juga sering membingungkan pengguna anggaran.

Menentukan biaya pendidikan di sekolah perlu dianalisis biaya total (*total cost*) dan biaya satuan siswa (*unit cost*). Biaya total, disebut juga biaya satuan sekolah, merupakan kumpulan biaya yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan siswa merupakan ukuran yang menggambarkan besaran uang yang dialokasikan sekolah untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Dengan menganalisis biaya satuan itu dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya di setiap sekolah, manfaat dari investasi pendidikan, dan pengeluaran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menyeleng-

garakan pendidikan.

Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif (Yahya 2003: 39).

Untuk menentukan biaya satuan (*unit cost*) dapat diperoleh dari hasil bagi dari jumlah seluruh pengeluaran biaya operasional selama satu tahun dibagi jumlah seluruh siswa. Melihat anggaran di tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Rembang lebih memperhatikan kepentingan siswa. Meskipun terjadi penurunan di semua anggaran pada tahun 2010/2011 bukan berarti terjadi penurunan kualitas pembelajaran dan peningkatan mutu pelayanan terhadap siswa hal ini lebih disebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi di tahun-tahun sebelumnya, misalnya pemenuhan sarana dan prasarana. Jumlah biaya persiswa pertahun memang tampak besar bila dibandingkan dengan SMP bukan RSBI di Rembang.

Kesanggupan orang tua murid membiayai anaknya di SMP Negeri 2 Rembang semakin meningkat dari tahun 2008/2009 hingga 2010/2011, yakni sebesar 46,06% pada tahun 2008/2009, sebesar 76,87% pada tahun 2009/2010, dan pada tahun ajaran 2010/2011 orang tua murid di RSBI SMP Negeri 2 Rembang memiliki kemampuan yang penuh untuk membayar biaya operasional pendidikan sampai 118,75%.

Hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam menggalang dana, yakni datang dari orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Hambatan yang muncul dari orang tua yakni komunikasi yang kurang baik antara anak dan orang tua, perbedaan persepsi orang tua murid tentang sekolah gratis, dan perbedaan jumlah siswa di RSBI. Hambatan yang muncul dari masyarakat antara lain rendahnya tingkat penghasilan masyarakat, merasa tak berwenang dan tidak mampu, serta pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang kurang. Hambatan yang muncul dari pemerintah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah datangnya selalu terlambat sementara kegiatan di sekolah harus berjalan terus, dari unsur pemeriksa juga sering membingungkan pengguna anggaran.

## Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai

berikut: 1) Besaran *unit cost* per siswa di SMP Negeri 2 Rembang pada tahun 2008/2009 sebesar Rp. 2.644.290,00, tahun 2009/2010 meningkat sebesar Rp. 1.195.894,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 3.840.184,00. Tahun 2010/2011 berkurang sebesar Rp. 618.056 sehingga menjadi Rp. 3.222.128,00; 2) Orang tua murid di SMP Negeri 2 Rembang memiliki kesanggupan yang fluktuatif dan semakin baik dari tahun ke tahun untuk membiayai anaknya di dalam mengikuti pendidikan di RSBI SMP Negeri 2 Rembang, tahun ajaran 2008/2009 memiliki kemampuan sebesar Rp. 316.636.630,00 (46,06%), tahun ajaran 2009/2010 memiliki kemampuan sebesar Rp. 532.224.145,00 (76,87%) dan tahun ajaran 2010/2011 memiliki kemampuan sebesar Rp. 502.969.267,00 (118,75%); 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam menggalang dana dari orang tua murid adalah komunikasi yang kurang, rendahnya tingkat penghasilan keluarga (tidak mampu), pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang kurang. Sedangkan hambatan dari masyarakat yaitu kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap dunia pendidikan karena merasa bukan kewenangannya, perilaku kurang bermasyarakat dari warga sekolah, adanya persaingan antar kelompok masyarakat, krisis kepercayaan terhadap sekolah secara umum, dan kemampuan ekonomi masyarakat Rembang yang mayoritas tergolong menengga ke bawah; 4) Proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Rembang jauh lebih baik dan maju dibandingkan dengan sebelum menjadi RSBI. Pada saat ini pembelajaran di SMP Negeri 2 Rembang sudah berbasis IT dan sebelum RSBI pembelajaran berbasis manual. Pembiayaan yang didukung dari dana bantuan RSBI telah mampu meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar; 5) Prestasi belajar siswa ditingkat Nasional belum menggembirakan, memang sudah ada yang berhasil meraih juara 1 baik akademik maupun non akademik tetapi jumlahnya belum banyak. Di tingkat Provinsi sudah lebih baik prestasi belajar siswa apalagi di tingkat Kabupaten padahal bila dibandingkan sesama RSBI di Jawa Tengah pembiayaan di SMP Negeri 2 Rembang paling kecil.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Dari besaran unit cost per siswa per tahun yang mencapai rata-rata Rp3.235.534,00 SMP Negeri 2 Rembang diharapkan bisa lebih meningkatkan prestasi dari yang sudah dicapai sekarang, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di level Internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik. Jumlah ini sudah cukup besar untuk ukuran Kabupaten Rembang.

Kebutuhan biaya operasional dan peningkatan mutu yang rata-rata mencapai angka Rp2.065.977.498,00 ini, 67,70% (Rp1.398.666.766) adalah bantuan pemerintah, sedangkan sumbangan dari orang tua murid hanya mencapai 32,30% (Rp667.310.731), kemampuan orang tua murid belum mencapai 50% dari total anggaran yang dibutuhkan. Jumlah ini tentu masih sangat kurang bila bantuan dari pemerintah dikurangi atau bahkan dihentikan. Untuk itu sekolah dan komite sekolah harus bekerja sama untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, karena tanpa biaya yang memadai sekolah akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.

Melihat kondisi masyarakat Rembang yang sosial ekonominya menengah ke bawah diharapkan pemerintan pusat dan daerah tidak lepas tangan, karena sesuai amanat undang-undang pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tanpa bantuan yang memadai, masyarakat Rembang tidak akan pernah mengenyam pendidikan yang bermutu. Sampai saat ini masyarakat Rembang masih mempermasalahakan hakekat sekolah gratis, mereka belum bisa menerima bahwa RSBI diperkenankan oleh aturan untuk memungut bantuan operasional. Pemerintah sebaiknya juga berperan aktif memberikan sosialisasi dan tidak mersepon secara sepihak terhadap aduan masyarakat.

Pemerintah dalam menyalurkan bantuan ke sekolah sebaiknya melihat kondisi di lapangan. Besaran bantuan selalu berubah-ubah dan itu sangat membingungkan sekolah dalam menyusun anggaran. Turunnya bantuan juga sering terlambat sehingga sekolah menunda kegiatan dan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan harus mencari pinjaman. Pemerintah diharapkan dapat membuat mekanisme yang lebih simpel dan luwes dan tidak berubah-ubah setiap saat.

Hamabatan yang paling nyata dalam menggalang dana (biaya pendidikan) adalah kemampuan orang tua murid dan masyarakat Rembang yang memang rendah, sedangkan manajemen tidak ada hambatan yang berarti karena diberlakukan sistem kontrol yang cukup ketat dari internal dan eksternal.

Proses belajar mengajar di RSBI harus lebih maju dan modern dibandingkan sekolah standar lainnya. Semua guru sudah waktunya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran serta mengadakan perbaikan dan pengayaan berbasis IT karena sekolah sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

## Daftar Pustaka

- Cohn, E. 1979. *The Economics of Education: An Introduction*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Coombs, P.H. dan Hallak, J. 1972. *Managing Educational Cost*. New York: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Sekolah bertaraf Internasional*. Jakarta: Depdiknas
- Fattah, N. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, A. 2003. *Studi Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Laporan Penelitian. Jakarta: Balitbang Depdiknas
- Mackenzie, J. Public School Funding and Performance FREC/CANR, University of Delaware, Newark, DE; Christina School District (DE) Board of Education. [http://www.udel.edu/johnmack/research/school\\_funding.pdf](http://www.udel.edu/johnmack/research/school_funding.pdf) .
- Online [19 Agustus 2011]
- [http://homepages.nyu.edu/~rf2/Research/Education\\_Finance\\_Systems.pdf](http://homepages.nyu.edu/~rf2/Research/Education_Finance_Systems.pdf)
- [http://iej.com.au/educational\\_investment\\_in\\_conflict\\_areas\\_of\\_indonesia\\_the\\_case\\_of\\_west\\_papua\\_province](http://iej.com.au/educational_investment_in_conflict_areas_of_indonesia_the_case_of_west_papua_province)
- John, R.L. dan E.L Morphet. 1975. *The Economic and Financing of Education*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs
- Jones. 1985. *School Finance: Technique and Social Policy*. London: Collier Macmillan Oub
- Jones, T.H. 1985. *Introduction To School Finance Technique And Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company and London: Macmillan Publisher
- Koontz, et.al (Alfonusus Sirait, ed). 1996. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Mills, R.P. et.a. 1998. *Cost-Effectiveness in Education: A First Report*. New York: Office of Regional School and Community Services New York State Education Department
- Mingat, A. dan Tan JP: 1988. *Analytical Tools for Sector Work in Education*. A World Bank Publication
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- PP Nomor 48/2008 tentang Pembiayaan Pendidikan
- Sanusi, A. 1995. *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Bandung: IKIP Bandung
- Satori, D. 2000. *Akuntabilitas Sekolah Efektif*. Bandung: UPI
- Sa'ud, U.S. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Wujud Nyata Desentralisasi Pendidikan*. Bandung: UPI
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Stoner, James A.F dan Freeman, E.R. 1994. *Management 4<sup>th</sup> Ed*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc
- Supriadi, D. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tilaar, H.A.R. 1994. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Thomas, J.A. 1971. *The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration*. New York: John Wiley & Sons
- Tenner, A.R. & DeToro, I.J. 1992. *Total Quality Management*. Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company
- Toumasis, C. 2004. Cooperative Study Teams in Mathematics Classrooms, *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*. 35/5: 669-679. Online. [25 Juni 2011]
- Tinbergen, J. 1987. Input-Output Analysis in Education. Dalam Psacharopoulos, G. Ed. 1987. *Economics of Education: Research and Studies*. New York: Pergamon Press
- Undang-Undang RI Nomor 20. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang: Aneka Ilmu
- Widjaya. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Woodhall, M. 1987. Earning and Education. dalam Psacharopoulos, G. Ed. 1987. *Economics of Education: Research and Studies*. New York: Pergamon Press
- Yahya. 2003. Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatra Barat. *Disertasi*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Yamin, M. 2007. *Kiat Membelajarkan Siswa*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Zakaria, E. dan Iksan, Z. 2007. Promoting Pembelajaran kooperatif in Science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*. 3/1: 35-39. Online. [27 Juni 2011]
- Zimelan, M. 1973. *Financing and Efficiency in Education: Reference for Administration and Policy Making*. Boston: The Nimrod Press